

FUNGSI RPJMDES DALAM MENGATASI MASALAH ANAK PUTUS SEKOLAH PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR

Eka Setya Budi dan Ana Rahmawati

Prodi Pendidikan Agama Islam UNISNU Jepara

Abstract

FUNCTION OF RPJMDES IN SOLVING PROBLEMS OF SCHOOL DROPOUT CHILDREN. The purpose of this study was to find out the function of the RPJMDes as a Development Policy Document in Bandung Village of Mayong Subdistrict, Jepara Regency in tackling the problem of school dropouts at the elementary school level in the village. This research used a descriptive qualitative method. The results of the analysis of the respondents' responses can be analyzed that although there are still many shortcomings in terms of facilities and infrastructure, the village government policy as outlined in the RPJMDes is at least able to reduce school dropouts at the elementary school level. The 36.17% community is also optimistic that the program to alleviate dropouts in the village medium term development plan prepared by the local village government will be able to solve the problem. The Village went down directly to provide motivation to them, but even so there were still some of them who were still reluctant to continue their studies. Thus the complexity of these problems is certainly necessary for other studies that explore other factors causing the existence of children who do not want to continue their studies in the modern era.

Keywords: *the function of the RPJMDes, school dropouts, elementary school*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui fungsi RPJMDes sebagai Dokumen Kebijakan Pembangunan di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam menanggulangi permasalahan anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil analisis penelitian dari tanggapan responden dapat di analisis bahwa meskipun masih banyak kekurangan dari sisi sarana dan prasarana namun sebenarnya kebijakan pemerintah desa yang dituangkan dalam RPJMDes setidaknya mampu mengurangi anak putus sekolah ditingkat sekolah dasar. Masyarakat sebanyak 36,17% juga optimis bahwa program pengentasan anak putus sekolah yang tertuang dalam RPJMDes yang disusun pemerintah desa setempat akan dapat menuntaskan masalah tersebut. Kepada Desa turun langsung untuk memberikan motivasi kepada mereka, namun meski demikian masih ada sebagian dari mereka yang masih enggan meneruskan sekolah mereka. Dengan demikian

kompleknya permasalahan ini tentu perlu adanya penelitian lain yang menggali factor lain penyebab masih adanya anak yang tidak mau melanjutkan sekolahnya di era modern saat ini.

Kata kunci: fungsi RPJMDes, anak putus sekolah; sekolah dasar

A. Pendahuluan

Pemerintahan ditingkat desa merupakan pemerintahan terkecil dari tingkat pemerintahan daerah, yang mana pemerintahan desalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa. Pemerintahan ditingkat desa diharapkan lebih peka terhadap segala permasalahan yang ada di dalam masyarakat desa. Sebagai penggerak pemerintahan di tingkat bawah desa diharapkan memberikan perhatian lebih bagi anak putus sekolah supaya mau melanjutkan pendidikan mereka. RPJMDes ialah rencana jangka menengah desa dan merupakan dokumen berisi rencana strategis pembangunan desa yang dijadikan sebagai acuan oleh pemangku kepentingan untuk menetapkan kebijakan, strategi, tujuan serta prioritas program pembangunan desa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Selain sebagai dokumen rencana kerja RPJMDes juga berisi penjabaran dari visi, misi serta dari program kepala desa.

Masalah anak putus sekolah menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Pemerintahpun telah mencanangkan berbagai kebijakan yang mempermudah warga negara untuk mendapatkan hak pendidikan tersebut. Kebijakan pemerintah pusat hendaknya disambut baik pemerintahan di tingkat desa, karena pemerintah desalah yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

Sebagian anak usia di bawah 15 tahun di desa Bandung kecamatan Mayong telah bekerja sebagai buruh untuk membantu perekonomian keluarga mereka, faktor lain ialah banyak anak yang ditinggalkan ibunya merantau untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian lebih dari keluarga terutama dalam bidang pendidikan. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meringankan biaya sekolah anak diantaranya berupa dana BOS, KIP, BSMserta masih banyak lagi bantuan pemerintah lainnya dibidang pendidikan, namun hal tersebut tidak mengurangi jumlah anak putus sekolah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Faktor sosial budaya dan ekonomi

dianggap menjadi penyebab banyaknya angka anak putus sekolah di desa tersebut. Program pemerintah tersebut ternyata belum menyentuh pada pendidikan orang miskin di desa Bandung kecamatan Mayong kabupaten Jepara tersebut yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, dan maupun keluar negeri sebagai TKI.

Dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa banyak sekali factor yang melatar belakangi masih adanya anak yang tidak mau melanjutkan pendidikannya. Salah satunya factor motivasi menjadi salah satu alasan anak putus sekolah atau tidak mau melanjutkan pendidikannya hal inidikarenakan anggapan sekolah itu tidak penting (Titaley, 2012).

Pentingnya untuk mengetahui Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah untuk memberikan gambaran sera sebagai penjas kerangka berfikir dalam pembahasan. Selain itu juga bertujuan untuk dijadikan bahan perbandingan dan acuan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sebagai pertimbangan penelitian, penulis menggali hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pengembangan. Beberapa penelitian yang penulis rujuk adalah:

Harry Cristian, dengan judul Pemerintahan Integratif, 2015, 3 (1) ; 190-2“Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.” Dalam eJournal 10 ISSN 2337-8670, ejournal.pin.or.id. adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa di desa Loa Janan Ulu kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara.

Ni AyuKrisnaDewi, dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013.” Dalam Jurnal Undiksha Vol. 1, No. 1, tahun 2014. ISSN 0215-8250, ejournal.undiksha.ac.id. adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui(1) faktor-faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013, dan (2) faktor yang dominan penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013.

Sodiyah dan suripno, dengan penelitian yang berjudul “Upaya pemerintah kabupaten kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah.” Dalam

jurnal.usu.ac.id. 2014 ISSN: 2549-130X, tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk menggambarkan upaya pemerintah kabupaten kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah, dan juga untuk mengetahui hambatan yang ditemui pemerintah kabupaten kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah. Hasilnya menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten kebumen melalui upaya preventif melalui bantuan beasiswa kepada keluarga kurang mampu kemudian dengan upaya kuratif yaitu dengan program pengurangan pekerja anak kemudian dengan upaya pembinaan yaitu dengan peningkatan keterampilan anak sedangkan hambatannya yang berasal dari pemerintah sendiri berupa keterbatasan teknologi, dan anggaran. Sedangkan hambatan dari luar pemerintahan berasal dari diri anak dan keluarga anak putus sekolah itu sendiri.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi RPJMDes sebagai Dokumen Kebijakan Pembangunan di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam menanggulangi anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar di desa tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui fungsi RPJMDes sebagai Dokumen Kebijakan Pembangunan di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam mengatasi anak putus sekolah di desa tersebut khususnya pada anak usia sekolah dasar. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diantaranya dapat dijadikan sebagai bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian ilmu sosial yaitu meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengentasan anak putus sekolah. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar lebih memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah. Menjadi bahan informasi bagi masyarakat akan perlunya sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan sosial terutama yang berkaitan dengan anak putus sekolah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono metode deskriptif ialah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan ataupun menganalisis suatu hasil penelitian namun tidak digunakan dalam membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2010). Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan, dan meringkaskan segala kondisi, situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang dijadikan objek penelitian. Sehingga menarik ke permukaan sebagai salah satu ciri

atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Dengan demikian peneliti akan berusaha menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi atau variabel yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Sumber data penelitian ini bersumber dari 1) data primer yang terdiri dari RPJMDes desa Bandung, kemudian data lain diperoleh melalui wawancara, penyebaran questioner kepada responden tentang pendapatnya ataupun tanggapannya terkait dengan fungsi RPJMDes atas penanganan masalah anak putus sekolah. 2) data sekunder yaitu data yang telah dipublikasikan atau diolah oleh instansi yang terkait. Data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini antara lain jumlah penduduk, struktur organisasi, luas wilayah. Populasi atau jumlah penduduk ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang dipakai oleh peneliti untuk dipelajari untuk ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Bandung yang berjumlah 975 Jiwa, yang tersebar dalam 10 RT dan 2 RW dengan rincian laki-laki 495 jiwa dan perempuan: 480 jiwa (RPJMDes-Bandung, 2017). Bila populasi besar maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi yang ada, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta tenaga. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil melalui populasi.

Adapun yang digunakan peneliti dalam metode pengumpulan data adalah dengan cara menyebarkan angket yaitu dengan membuat daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis, yang berkaitan dengan variabel penelitian yang kemudian disebarkan kepada masyarakat desa Bandung. Dengan wawancara yaitu berupa Tanya jawab langsung dengan responden yang bertujuan untuk memperoleh Data atau informasi yang relevan. Dengan penelitian ini dimana dengan dilakukan dengan tatap muka. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpulkan, maka data tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan serta dianalisis baik secara kualitatif, kemudian data dianalisa secara deskriptif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah anak putus sekolah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara kemudian diambil dalam suatu kesimpulan.

B. Pembahasan

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan sangat menentukan sekali terhadap hasil RPJMDes, tanpa partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap hasil penyusunan RPJMDes yang tidak sesuai dengan harapan maupun keinginan dari masyarakat. Aspirasi dari masyarakat dapat ditampung dengan bentuk pertemuan, diskusi, maupun seminar untuk mendapatkan pandangan masyarakat tentang visi maupun misi pembangunan yang sesuai harapan. Aspirasi masyarakat tersebut sebenarnya dapat diserap saat pelaksanaan MusrenbangDesa seperti yang telah diamanatkan dalam UU no 25 tahun 2004 (Syafriзал, 2014).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan awal penyusunan rancangan APB Desa. Musyawarah ini memuat tentang penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa yang telah terpilih dan berisi tentang arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh masyarakat desa. Dalam penyusunannya, Pemerintah desa wajib menyelenggarakannya secara partisipatif, serta diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa menetapkan prioritas program kegiatan serta kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat, atau APBD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen yang berisi perencanaan pemerintah desa untuk periode enam tahun yang berisi arah kebijakan pembangunan desa, keuangan desa, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas SKPD, serta program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJMDes disusun dengan melihat kondisi desa secara objektif serta berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten/ kota. Pada proses penyusunan RPJMDes haruslah melibatkan seluruh elemen masyarakat. RPJMDes menjadi instrumen yang digunakan untuk membangun partisipasi, demokrasi, serta kemandirian ditingkat desa. Rencana pembangunan desa berdasarkan pada pemberdayaan, partisipasi dari pihak masyarakat secara terbuka, akuntabel, keberlanjutan, dan cermat. Hal terpenting dalam penyusunan RPJMDes meyakinkan bahwasanya arah dan kebijakan pembangunan desa dapat mencerminkan kesatuan visi dan misi Kepala Desa yang terpilih dengan mendahulukan kepentingan masyarakat desa secara luas. Oleh karenanya masyarakat desa harus terlibat aktif mulai dari menginventarisir potensi, kebutuhan serta masalah pada rapat

Musrebang.

Dokumen RPJMDes bertujuan dalam mewujudkan segala perencanaan pembangunan yang ada di Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta keadaan yang terjadi di desa tersebut, dengan menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab terhadap program pembangunan terhadap desa. Disertai dengan memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan dari desa tersebut, sehingga menumbuhkembangkan seluruh peranserta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Dokumen RPJMDes yang disusun oleh Desa haruslah memiliki rencana dalam pembangunan yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut nantinya menjadi pedoman dalam segala penyusunan rencana dalam pembangunan desa yang berdasarkan pada konsep partisipasi di masyarakat. Penetapan dokumen RPJMDes sangatlah penting berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumen terkait peran aktif kepala desa juga berperan penting dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan di Desa mulai dari awal tahap perencanaan sampai terselesainya kegiatan.

RPJMDes merupakan dokumen penting desa yang memuat perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun yang nantinya memuat arah kebijakan dalam pembangunan desa, yaitu dalam arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum sertakegiatan pembangunan di tingkat desa. Sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMDes berlaku dalam jangka waktu satu tahun. Jadi RPJMDes dan RKP Desa adalah dasar dari pembangunan desa yang bertujuan untuk melakukan upaya dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa (Pristiyanto D, 2015).

Dampak Anak Putus Sekolah pada Tingkat Sekolah Dasar

Anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar tentu akan menimbulkan banyak dampak negative baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Apabila tingkat pendidikan orang tua rendah tentu hal ini akan mempengaruhi pendidikan anak-anaknya kelak. Anak bias jadi akan meniru pola fikir dari orang tuanya dengan anggapan pendidikan bukan suatu hal yang penting bagi masa depan mereka. Dengan pemikiran seperti itu nantinya akan menimbulkan banyak pengangguran hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan yang mereka miliki hal ini

menjadikan beban bagi orang tua mereka dan dapat meresahkan lingkungan masyarakat disekitar mereka dikarenakan tidak adanya tujuan hidup dan pekerjaan yang mereka miliki. Pendapat ini sejalan dengan Gunawan yang menyebutkan bahwa masalah anak putus sekolah terutama di jenjang yang rendah atau sekolah dasar yangmana anak tersebut nantinya tidak bekerja dan tidak berpenghasilan tentunya hal ini akan meresahkan ketentraman masyarakat, terlebih mereka telah mengganggu ketentraman masyarakat hal ini disinyalir akan menimbulkan kenakalan remaja di daerah tersebut (Gunawan, 2010).

Kenakalan tersebut jelas nantinya akan menimbulkan gangguan di masyarakat berupa kenakalan yang bertentangan dengan norma social positif. Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan bertambahnya pengangguran dan tindak kejahatan criminal. Dampak lain dari Anak usia sekolah dasar yang tidak melanjutkan pendidikannya ialah anak tersebut tidak memiliki tujuan hidup di masa yang mendatang. Ketika anak sudah tidak memiliki tujuan hidup tentu sangat berpengaruh bagi pola pikirnya kelak. Ia akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat negatif dan juga berbau kejahatan. Karena melalui sekolah dan belajar bersama tentu anak akan belajar bersosialisasi dan hal tersebut akan membangun mental dari anak didik. Anak yang putus sekolah ditingkat sekolah dasar tentu mempengaruhi juga psikologi kejiwaannya, menjadikan anak tidak memiliki cita – cita, harapan dimasa depan yang dapat digapai hanya dengan sekolah menjadi hilang, karena dengan menempuh pendidikan salah satu cara seseorang untuk dapat menggapai apa yang dicita-citakannya. Ini juga dapat menimbulkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang menjadi anak jalanan. Akibat putus sekolah juga dapat mengakibatkan anak menjadi malas, tidak memiliki sopan santun kepada orang tua maupun keluarganya Anak hal ini dikarenakan kurang tahunya tentang bagaimana bersikap baik serta bersikap hormat kepada orang yang lebih tua. Akibat lain yang mengkhawatirkan ialah anak menjadi sosok yang mudah stress atau frustasi, karena kebingungannya dengan masa depan mereka nantinya (Latif, 2015).

Berbagai upaya dalam penanganan anak putus sekolah tidaklah sedikit, pemerintah telah berupaya dengan berbagai program dalam mengurangi masalah anak putus sekolah tersebut. Dan nampaknya factor ekonomi bukanlah satu-satunya factor yang menyebabkan munculnya masalah ini, ini terlihat meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana yang begitu besar setiap tahunnya untuk pendidikan namun

masalah ini masih saja terus berlanjut dari tahun ke tahun. Dan dalam data statistik pendidikan tahun 2017/2018 menyebutkan bahwa tingkat anak putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Jawa Tengah masih dalam posisi ke tiga setelah Jawa Barat di posisi pertama dan Sumatera Utara diposisi ke 2 (Ikhtisar data pendidikan dan kebudayaan. 2017/2018).

Analisis Fungsi RPJMDes dalam Mengentaskan Anak Putus Sekolah pada Tingkat Sekolah Dasar

Perencanaan merupakan proses mengorganisir, mengarahkan serta upaya dalam mengendalikan sebuah kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pembangunan akan terselenggara dengan baik bila diawali dengan system perencanaan yang baik pula, hal ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, proses perencanaan pembangunan haruslah berpihak pada masyarakat serta dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat (Hanafi, 2004). Untuk mengetahui gambaran adanya keberpihakan RPJMDes dalam mengatasi masalah anak putus sekolah di desa Bandung, maka dapat terlihat dari tingkat masyarakat yang merasa bahwa RPJMDes yang sudah ada sekarang ini dapat menjadi solusi atas masalah tersebut.

Tabel Tanggapan Responden tentang Pemerintah Desa Saat Ini Memperhatikan Pendidikan Anak di Desa Bandung

Kategori Jawaban	Responden	%
Sangat setuju	5	5,32 %
setuju	19	20,2 %
Ragu-ragu	49	52,1%
Tidak Setuju	31	33%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	94	100%

Sumber :Data Olahan Penelitian 2018

Data di atas menunjukkan bahwa 52,1 % responden ragu-ragu perihal perhatian pemerintah desa dalam hal pendidikan di desa Bandung, 33% tidak setuju 20,2% dan 5,32% responden sangat setuju.

Bapak Ahmad, dalam wawancaranya dengan kami, beliau mengatakan “*saya rasa pemerintah desa Bandung kurang memperhatikan pendidikan warganya, anda*

bisa melihat sarana dan prasarana pendidikan saja di desa ini, keadaannya seperti itu ala kadarnya.”(wawancara 22 Mei 2018).

Tanggapan Responden tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Bandung Saat ini Sudah Memadai

Kategori Jawaban	Responden	%
Sangat setuju	3	3,19 %
setuju	6	6,38 %
Ragu-ragu	20	21,3 %
Tidak Setuju	51	54,3 %
Sangat Tidak Setuju	14	14,9 %
Jumlah	94	100%

Sumber :Data Olahan Penelitian 2018

Dari data responden di atas sebagian besar menyatakan bahwa 54,3% penduduk tidak setuju bila sarana dan prasarana pendidikan di desa Bandung saat ini dinyatakan sudah memadai. Hal ini peneliti sinkronkan dengan data sarana prasarana yang terdapat dalam RPJMDes-Bandung pada bab ii (RPJMDes-Bandung, 2017)

Sarana prasarana pada TK TPQ Madrasah dan SD sudah ada meskipun belum cukup memadai, hal ini terlihat dari sisi bangunan dari lembaga pendidikan tersebut yang masih memprihatinkan. Dan pada bab iii di isi RPJMDes tentang potensi dan masalah poin 22 berisi “Pembinaan & Pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) masih memprihatinkan perlu adanya bantuan dari pemerintah desa.”Dan pada poin 24 berisi “Sarana dan prasarana Pendidikan non formal/keagamaan di desa masih memprihatinkan.” (RPJMDes-Bandung, 2017).

Tabel Tanggapan Responden tentang Potensi Desa dalam Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kategori Jawaban	Responden	%
Sangat Setuju	5	5,32%
Setuju	11	11,7%
Ragu-ragu	51	54,3%
Kurang Setuju	27	28,7%
Tidak Setuju	-	-
Jumlah	94	100%

Sumber :Data Olahan Penelitian 2018

Dari data di atas menunjukkan bahwa 54% responden ragu-ragu desa Bandung dapat mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, 28,7% kurang setuju, 11,7%

setuju dan 5,32% responden sangat setuju. Dari beberapa hasil wawancara dengan masyarakat dapat kami simpulkan bahwa selama ini sarana pendidikan di desa Bandung hanya seperti ini saja belum ada pembenahan dari pemerintah desa di sektor bangunan dan fasilitas lainnya, bisa dilihat dari bentuk bangunan TK dan TPQ yang kurang terawat.

Bapak Sofyan mengatakan kepada kami “*dari dulu kondisi sekolah sekolah yang ada di desa ini ya seperti ini saja,, belum pernah ada perubahan yang signifikan saya masih ragu kedepannya bisa bertambah maju, namun sebagai warga saya tetap optimistis pemerintah desa yang saat ini bisa lebih baik.*” (wawancara, 22 Mei 2018).

Tabel Tanggapan Responden Tentang Kebijakan RPJMDes Apakah mampu Menanggulangi Anak Putus Sekolah di Tingkat SD

Kategori Jawaban	Responden	%
Sangat setuju	10	10,64 %
Setuju	34	36,17 %
Ragu-ragu	24	25,53 %
Tidak Setuju	19	20,21 %
Sangat Tidak Setuju	7	7,45 %
Jumlah	94	100%

Sumber :Data Olahan Penelitian 2018

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju sebanyak 36,17 % bahwa RPJMDes yang sudah ada sekarang ini sudah mendukung program wajib belajar 9 tahun sedangkan 25,53 % masih ragu-ragu, 20,21 % tidak setuju dan 10,64 % menganggap sangat setuju dan 7,45% sangat tidak setuju.

Data ini kami sinkronkan dengan RPJMDes-Bandung, dalam bab iii tentang potensi dan masalah point 23 tertulis “ masih ada anak putus sekolah” (RPJMDes-Bandung, 2017). Dengan demikian menunjukkan bahwa pemerintah desa Bandung menyadari adanya permasalahan anak putus sekolah, dan masalah tersebut menjadi pembahasan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa Bandung. Menurut hasil wawancara kami dengan petinggi Desa Bandung bapak Mundhofar beliau menyatakan “*bahwa beberapa anak yang tidak mau melanjutkan sekolah mereka, telah saya datangi langsung dan saya bujuk namun memang ada sebageian yang mau*

melanjutkan dan sebagian yang lain (2 orang) tidak mau berangkat sekolah karena factor-faktor tertentu.”(wawancara, 22 Mei 2018)

C. Simpulan

Dari tanggapan responden tentang perhatian pemerintah desa terhadap pendidikan anak di desa Bandung masyarakat terbanyak menilai masih ragu ragu sebanyak 52,1%, Sedangkan tentang sarana dan prasarana pendidikan belum memadai masyarakat menilai 54,3 % tidak setuju ketika ditanya apakah sarana dan prasarana pendidikan sudah memadai. Dan 54,3 % masyarakat ragu-ragu Desa dapat mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan. Sebesar 46,8% responden ragu-ragu. Namun sebesar 36,17 % masyarakat optimis bahwa kebijakan RPJMDes dapat mengurangi anak putus sekolah pada tingkat dasar.

Dari tanggapan responden di atas dapat di analisis bahwa meskipun masih banyak kekurangan dari sisi sarana dan prasarana namun sebenarnya kebijakan pemerintah desa yang dituangkan dalam RPJMDes setidaknya mampu mengurangi anak putus sekolah ditingkat sekolah dasar dan masyarakat sebanyak 36,17% optimis, hal ini juga terlihat dari tindakan pemerintah desa yang secara khusus mendatangi satu persatu anak yang tidak mau melanjutkan sekolah gaar mau berangkat sekolah, meskipun hasilnya masih ada beberapa anak yang masih enggan mau berangkat.

Tentu hal ini menjadi perhatian kita semua, ternyata pemasalahan anak putus sekolah bukan permasalahan yang mudah di atasi, ternyata bukan hanya factor ekonomi, maupun factor motivasi saja yang melatarbelakangi keengganan mereka dalam melanjutkan sekolah. Dari sisi ekonomi pemerintah telah banyak mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk pendidikan di Indonesia, diantara sekolah pada jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama digratiskan oleh pemerintah, bahkan pemerintah juga telah memberikan bantuan dana BOS serta Kartu Indonesia Pintar untuk menyokong pendidikan anak-anak Indonesia, namun pada kenyataannya masih sisi motivasi, dari pihak pemerintah di tingkat Desa seperti yang terjadi desa Bandung kecamatan Mayong, pemerintah desa telah mencantumkan masalah anak putus sekolah dalam skala prioritas program kerjanya. Kepada desa turun langsung untuk memberikan motivasi kepada mereka, namun meski demikian masih ada sebagian dari mereka yang masih enggan meneruskan sekolah mereka. Dengan demikian kompleksnya permasalahan ini tentu perlu adanya penelitian lain yang

menggali factor lain penyebab masih adanya anak yang tidak mau melanjutkan sekolahnya di era modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, Mahduh M. 2004. *Pengantar Manajemen*. UIR Press.
- Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, 2017. *Ikhtisar data Pendidikan dan Kebudayaan 2017/2018*. Jakarta.
- Latif, Aasma. Choudhary, Ali Ifitar. Hammayun, Asal afzal. 2015. "Economic Effects Of Student's Dropouts (A Comparative Studi of Students' Dropouts Globally)". *International Journal of Economic, Commerce and management*. Vol III, Issu 6, june 2015.
- RPJMDes-Bandung 2017.
- Syafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R& D*. Bandung. alfabeta
- Titaley, Merry Elike. 2012. "Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah pada Sekolah Menengah pertama di SMPN 4 Taman Siswa Jakarta Pusat". *Tesis*. Jakarta. FISIP. UI.
- Pristiyanto D. 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta Selatan. Yayasan penabulu.